

Strategi Baru Peningkatan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Global

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. Produktivitas

Efisiensi • SDM unggul
• Daya saing

2. Inovasi

Transformasi digital
• AI • Riset

3. Industrialisasi

Nilai tambah • Hilirisasi
• Investasi

4. Kesejahteraan Berkelanjutan

Inklusif • Hijau • Tangguh

Menuju Indonesia yang maju, adaptif, produktif, dan berkelanjutan.

*Rudy C Tarumingkeng: Strategi Baru Peningkatan Ekonomi Indonesia
di Tengah Perubahan Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)

Rektor, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)

Chairman Board of Professors IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Scientist dan Chairman Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

URL: <https://rudycr.com/ab/Buku-Artikel-rudycr-23-24.htm>

© RUDYCT e-PRESS

rudycr75@gmail.com

Bogor, Indonesia

8 Juli 2026

STRATEGI BARU PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH PERUBAHAN GLOBAL

Abstrak

Indonesia memasuki periode pembangunan yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil, tetapi dunia sedang berubah melalui fragmentasi geopolitik, perlambatan perdagangan global, kompetisi teknologi, transisi energi, digitalisasi, kecerdasan buatan, disrupsi rantai pasok, serta meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, strategi peningkatan ekonomi Indonesia tidak cukup lagi bertumpu pada konsumsi domestik, eksploitasi sumber daya alam, ekspansi infrastruktur fisik, atau stabilitas makroekonomi semata. Indonesia membutuhkan strategi baru yang lebih produktif, inovatif, adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Artikel ini membahas arah baru peningkatan ekonomi Indonesia melalui penguatan produktivitas, transformasi struktural, industrialisasi berbasis nilai tambah, ekonomi digital, kecerdasan buatan, pengembangan sumber daya manusia, reformasi kelembagaan, transisi hijau, penguatan UMKM, integrasi wilayah, dan diplomasi ekonomi di tengah perubahan global. Data mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan: pertumbuhan triwulan I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan, sementara IMF memperkirakan pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Namun, laporan World Bank menegaskan bahwa pertumbuhan sekitar 5% belum cukup untuk mencapai sasaran pendapatan tinggi pada 2045 tanpa reformasi produktivitas, kompetisi, perdagangan, investasi, dan keterampilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi baru ekonomi Indonesia harus bergerak dari pertumbuhan berbasis faktor menuju pertumbuhan

berbasis produktivitas, pengetahuan, inovasi, tata kelola, dan kesejahteraan berkelanjutan.

Kata kunci: *ekonomi Indonesia, strategi pembangunan, produktivitas, inovasi, transformasi struktural, ekonomi digital, AI, transisi hijau, kesejahteraan berkelanjutan, Indonesia Emas 2045.*

1. Pendahuluan

Peningkatan ekonomi Indonesia pada dekade mendatang tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai usaha menaikkan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan tetap penting, tetapi tantangan pembangunan saat ini jauh lebih luas. Indonesia harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan pekerjaan bermutu, memperkuat daya saing industri, meningkatkan produktivitas nasional, memperluas kelas menengah, mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan wilayah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dunia sedang mengalami perubahan besar. Setelah pandemi COVID-19, ekonomi global tidak kembali ke pola lama. Rantai pasok menjadi lebih politis. Perdagangan global menghadapi ketegangan tarif dan proteksionisme. Investasi asing semakin selektif dan sering diarahkan oleh kepentingan geopolitik, keamanan teknologi, dan strategi industri negara-negara besar. Kecerdasan buatan mempercepat transformasi produksi, jasa, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan administrasi publik. Perubahan iklim mendorong transisi energi, tetapi sekaligus menimbulkan biaya penyesuaian yang tidak kecil. Konflik geopolitik meningkatkan risiko harga energi, pangan, dan logistik global.

Dalam situasi semacam ini, strategi ekonomi Indonesia tidak cukup hanya bersifat reaktif. Indonesia membutuhkan strategi baru yang mampu membaca perubahan global sebagai ancaman sekaligus

peluang. Strategi baru itu harus menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana Indonesia dapat naik kelas dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan konsumsi domestik menuju ekonomi berbasis produktivitas, inovasi, nilai tambah, teknologi, dan kesejahteraan berkelanjutan?

Secara makro, Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun pada triwulan tersebut. Struktur ekonomi masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi 57,24%, yang menunjukkan kekuatan aglomerasi tetapi sekaligus memperlihatkan tantangan pemerataan wilayah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) IMF juga menilai ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi di tengah guncangan eksternal, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026, meskipun risiko perdagangan global, ketidakpastian kebijakan, dan volatilitas pasar keuangan tetap tinggi. ([IMF](#))

Namun, pertumbuhan sekitar 5% belum cukup untuk membawa Indonesia secara meyakinkan menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045. World Bank menegaskan bahwa pertumbuhan Indonesia telah stabil di sekitar 5%, tetapi level tersebut berada di bawah kebutuhan untuk mencapai sasaran pendapatan tinggi; penciptaan kerja masih terlalu terkonsentrasi pada aktivitas bernilai rendah, sementara pekerjaan kelas menengah dan berproduktivitas tinggi tumbuh terlalu lambat. (worldbank.org)

Oleh karena itu, peningkatan ekonomi Indonesia harus diletakkan dalam paradigma baru: bukan hanya memperbesar ekonomi, tetapi memperbaiki struktur ekonomi; bukan hanya mengejar investasi, tetapi meningkatkan kualitas investasi; bukan hanya memperluas digitalisasi, tetapi menjadikannya mesin produktivitas; bukan hanya hilirisasi bahan mentah, tetapi membangun kompleksitas industri; bukan hanya

menciptakan lapangan kerja, tetapi pekerjaan bermutu; bukan hanya menurunkan kemiskinan, tetapi memperluas kapabilitas manusia.

2. Perubahan Global sebagai Konteks Strategis

Strategi ekonomi Indonesia harus dimulai dari pembacaan terhadap perubahan global. Ada beberapa perubahan besar yang menjadi konteks utama.

Pertama, ekonomi global memasuki fase pertumbuhan yang lebih lambat dan tidak merata. World Bank dalam *Global Economic Prospects* Juni 2026 memperkirakan pertumbuhan global melambat menjadi 2,5% pada 2026, turun dari 2,9% pada 2025. Perkiraan pertumbuhan untuk sekitar dua pertiga ekonomi dunia juga diturunkan dibanding proyeksi Januari 2026. ([worldbank.org](https://www.worldbank.org)) Ini berarti Indonesia akan menghadapi lingkungan eksternal yang tidak sekuat periode globalisasi awal 2000-an. Permintaan ekspor, aliran modal, harga komoditas, dan stabilitas pasar keuangan dapat berfluktuasi lebih tajam.

Kedua, globalisasi berubah dari efisiensi menuju keamanan. Pada masa lalu, perusahaan multinasional memilih lokasi produksi berdasarkan biaya rendah dan efisiensi rantai pasok. Kini, negara dan perusahaan juga mempertimbangkan keamanan pasokan, kedekatan politik, risiko konflik, ketahanan energi, dan kontrol teknologi. Istilah seperti *friend-shoring*, *near-shoring*, dan *de-risking* mencerminkan perubahan ini. Indonesia tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi murah; Indonesia harus menjadi simpul strategis rantai nilai yang aman, kompetitif, dan bernilai tambah.

Ketiga, investasi asing semakin terkonsentrasi pada sektor strategis. UNCTAD melaporkan bahwa FDI global meningkat 6% menjadi USD 1,6 triliun pada 2025, tetapi pemulihan tersebut rapuh dan tidak merata; ekspansi investasi banyak didorong oleh proyek besar, terutama infrastruktur terkait kecerdasan buatan, sementara aktivitas proyek baru

di banyak sektor tetap lemah akibat ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#)) Bagi Indonesia, hal ini berarti persaingan menarik investasi akan semakin ketat. Investasi tidak datang hanya karena pasar besar; ia datang karena kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, talenta, energi, logistik, dan ekosistem industri.

Keempat, kecerdasan buatan menjadi teknologi umum baru. AI tidak hanya memengaruhi sektor teknologi, tetapi juga manufaktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, keuangan, logistik, perdagangan, pertahanan, dan pemerintahan. Negara yang mampu mengadopsi AI secara produktif akan memperoleh lompatan efisiensi dan inovasi. Sebaliknya, negara yang hanya menjadi pengguna pasif platform asing dapat kehilangan kedaulatan data, kapasitas teknologi, dan peluang nilai tambah.

Kelima, transisi energi dan ekonomi hijau menjadi agenda ekonomi, bukan sekadar agenda lingkungan. Negara-negara maju menerapkan standar karbon, rantai pasok bersih, pembiayaan hijau, dan regulasi keberlanjutan. Produk Indonesia di masa depan akan semakin dinilai bukan hanya dari harga, tetapi juga dari jejak karbon, keterlacakan bahan baku, standar tenaga kerja, dan tata kelola lingkungan. Indonesia sebagai produsen komoditas, energi, dan produk manufaktur harus menyesuaikan diri agar tidak kehilangan akses pasar.

Keenam, demografi global berubah. Banyak negara maju mengalami penuaan penduduk, sementara Indonesia masih memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Tetapi bonus demografi bukan hadiah otomatis. Bonus demografi hanya menjadi bonus bila tenaga kerja sehat, terdidik, terampil, produktif, dan terserap dalam pekerjaan bermutu. Bila tidak, bonus demografi dapat berubah menjadi tekanan sosial berupa pengangguran, informalitas, dan ketimpangan.

Dengan demikian, perubahan global menuntut strategi ekonomi Indonesia yang lebih cerdas. Indonesia harus menggabungkan ketahanan domestik dengan keterbukaan strategis; stabilitas makro

dengan transformasi struktural; pertumbuhan pasar domestik dengan integrasi global; industrialisasi dengan inovasi; dan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis.

3. Diagnosis Ekonomi Indonesia: Kuat Bertahan, Belum Cukup Melompat

Indonesia memiliki reputasi sebagai ekonomi besar yang relatif stabil. Konsumsi domestik, ukuran pasar, stabilitas politik relatif, dan kebijakan makro yang berhati-hati menjadi penopang. Namun, stabilitas tidak identik dengan transformasi. Tantangan Indonesia bukan hanya bertahan dari krisis, tetapi melompat menuju struktur ekonomi maju.

Pada sisi positif, kemiskinan menurun. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2025 sebesar 8,25%, turun dari 8,47% pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang, turun 0,49 juta dari Maret 2025. Namun, kemiskinan perdesaan masih 10,72%, lebih tinggi dibanding kemiskinan perkotaan 6,60%.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Data ini menunjukkan kemajuan, tetapi juga menunjukkan bahwa kemiskinan Indonesia masih bersifat struktural dan spasial. Masalah produktivitas desa, akses pasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kualitas pekerjaan masih menjadi agenda besar.

Pada sisi digital, Indonesia memiliki momentum kuat. Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain memperkirakan ekonomi digital Indonesia hampir mencapai GMV USD 100 miliar pada 2025, tumbuh 14% dari tahun sebelumnya, dan tetap menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. E-commerce diproyeksikan mencapai USD 71 miliar, sedangkan pembayaran digital diproyeksikan mencapai GTV USD 538 miliar pada 2025. ([blog.google](#)) Ini peluang besar. Namun, GMV bukan ukuran akhir produktivitas nasional. Pertanyaan strategisnya adalah apakah ekonomi digital memperkuat industri, UMKM, ekspor,

keterampilan, dan pekerjaan bermutu, atau hanya memperbesar konsumsi digital.

Pada sisi inovasi, Indonesia mulai menunjukkan perbaikan tetapi belum berada di kelompok atas. WIPO mencatat Indonesia berada pada peringkat ke-55 dari 139 ekonomi dalam Global Innovation Index 2025, dan termasuk negara yang "overperform" relatif terhadap tingkat pendapatannya. Namun, WIPO juga menunjukkan kelemahan Indonesia pada human capital and research, sementara kekuatan relatifnya berada pada skala pasar domestik dan aspek kelembagaan tertentu. ([WIPO](#)) Artinya, Indonesia memiliki pasar besar, tetapi belum cukup kuat dalam riset, talenta, teknologi, dan kapasitas inovasi industri.

Pada sisi produktivitas, OECD menekankan bahwa Indonesia perlu memperbaiki lingkungan produktivitas, memanfaatkan digitalisasi, dan melanjutkan transisi menuju emisi nol bersih. OECD juga menilai konsumsi swasta masih menjadi mesin utama pertumbuhan, sedangkan reformasi struktural diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup menuju negara maju pada 2045. ([OECD](#))

Diagnosis ini mengarah pada kesimpulan penting. Indonesia tidak kekurangan potensi, tetapi membutuhkan transformasi kualitas pertumbuhan. Potensi demografi harus menjadi human capital. Potensi sumber daya alam harus menjadi nilai tambah industri. Potensi digital harus menjadi produktivitas. Potensi pasar domestik harus menjadi skala inovasi. Potensi wilayah harus menjadi pusat pertumbuhan baru.

4. Kerangka Teoretis: Dari Akumulasi Faktor Menuju Pertumbuhan Produktif

Dalam teori pembangunan ekonomi, negara dapat tumbuh melalui akumulasi faktor produksi: menambah tenaga kerja, memperluas lahan, meningkatkan investasi fisik, dan membangun infrastruktur. Namun, pertumbuhan semacam itu memiliki batas. Ketika modal bertambah

tetapi produktivitas tidak meningkat, tambahan output akan semakin menurun. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh kemajuan teknologi dan produktivitas total faktor, bukan hanya akumulasi modal.

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan Romer menekankan bahwa pengetahuan, riset, inovasi, dan investasi pada sumber daya manusia dapat menjadi sumber pertumbuhan dari dalam sistem ekonomi. Artinya, negara tidak harus menunggu teknologi datang dari luar; negara dapat membangun sistem inovasi sendiri melalui pendidikan, penelitian, kewirausahaan, insentif, dan kelembagaan yang mendorong penciptaan pengetahuan.

Teori institusional Acemoglu, Johnson, dan Robinson menekankan pentingnya institusi inklusif. Ekonomi dapat tumbuh lebih sehat bila aturan main memberi ruang bagi kompetisi, inovasi, perlindungan hak, partisipasi luas, dan pembatasan rente. Institusi ekstraktif mungkin mampu menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi sulit menciptakan kemakmuran luas dan berkelanjutan.

Dari perspektif transformasi struktural, pembangunan terjadi ketika tenaga kerja dan modal berpindah dari sektor produktivitas rendah ke sektor produktivitas tinggi. Namun, transformasi struktural yang sehat bukan sekadar perpindahan dari pertanian ke kota. Bila tenaga kerja keluar dari pertanian tetapi masuk ke jasa informal rendah produktivitas, maka transformasi hanya berubah bentuk, bukan naik kualitas. Indonesia membutuhkan transformasi menuju manufaktur modern, agroindustri, jasa profesional, ekonomi digital produktif, ekonomi hijau, dan industri berbasis pengetahuan.

Dari perspektif kapabilitas Amartya Sen, pembangunan bukan hanya kenaikan pendapatan, tetapi perluasan kemampuan manusia untuk hidup sehat, belajar, bekerja, berpartisipasi, dan memilih masa depan yang bermartabat. Oleh karena itu, strategi ekonomi Indonesia harus menghubungkan produktivitas dengan kesejahteraan manusia.

Dengan landasan tersebut, strategi baru peningkatan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada lima prinsip: produktivitas, inovasi, inklusi, keberlanjutan, dan adaptabilitas. Produktivitas memastikan ekonomi menghasilkan nilai lebih tinggi. Inovasi menciptakan sumber pertumbuhan baru. Inklusi memastikan manfaat pembangunan tersebar luas. Keberlanjutan menjaga fondasi ekologis. Adaptabilitas membuat bangsa mampu merespons perubahan global.

5. Strategi Pertama: Meningkatkan Produktivitas Nasional

Strategi paling mendasar adalah meningkatkan produktivitas. Tanpa produktivitas, pertumbuhan hanya bergantung pada penambahan input: lebih banyak lahan, lebih banyak tenaga kerja, lebih banyak modal, lebih banyak eksploitasi sumber daya alam. Model seperti ini tidak cukup untuk menjadi negara maju.

Produktivitas harus dibangun pada tiga tingkat.

Pertama, produktivitas tenaga kerja. Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan teknis, literasi digital, kemampuan analitis, dan etos kerja. Pekerja masa depan harus mampu bekerja dengan mesin, data, AI, dan sistem produksi modern. Mereka juga harus memiliki soft skills: komunikasi, kolaborasi, kreativitas, disiplin, dan pemecahan masalah.

Kedua, produktivitas perusahaan. Banyak perusahaan, terutama UMKM, masih menghadapi masalah manajemen, pencatatan keuangan, efisiensi proses, kualitas produk, akses teknologi, dan skala usaha. Produktivitas perusahaan tidak cukup ditingkatkan dengan bantuan modal; ia membutuhkan pendampingan manajemen, standardisasi, digitalisasi proses, akses pasar, dan pembelajaran organisasi.

Ketiga, produktivitas sistemik. Negara harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan perusahaan produktif tumbuh dan perusahaan

tidak produktif bertransformasi atau keluar dari pasar secara sehat. Ini memerlukan kompetisi, kepastian hukum, perizinan sederhana, logistik efisien, pembiayaan produktif, dan regulasi yang tidak menciptakan rente.

World Bank menilai hambatan produktivitas Indonesia antara lain berasal dari kekuatan pasar, hambatan regulasi, dan terbatasnya difusi pengetahuan. Reformasi dalam kompetisi, perdagangan, investasi, keuangan, dan keterampilan diperkirakan dapat meningkatkan PDB hingga 10% dan pendapatan tenaga kerja 11% di atas baseline tanpa reformasi pada 2040, serta menciptakan 16,5 juta pekerjaan berkualitas lebih baik. (worldbank.org)

Peningkatan produktivitas juga harus berbasis sektor. Di pertanian, produktivitas dapat ditingkatkan melalui benih unggul, irigasi presisi, mekanisasi, penyuluhan digital, asuransi pertanian, akses pasar, pengolahan pascapanen, dan rantai dingin. Di manufaktur, produktivitas membutuhkan otomasi, lean management, industrial internet of things, standardisasi kualitas, pelatihan teknis, dan integrasi rantai pasok. Di jasa, produktivitas membutuhkan digitalisasi, profesionalisasi, standar layanan, dan peningkatan keterampilan.

Indonesia juga perlu membangun gerakan produktivitas nasional. Produktivitas tidak boleh dianggap hanya sebagai urusan teknokrat, tetapi sebagai budaya bangsa: bekerja lebih cerdas, belajar terus-menerus, mengurangi pemborosan, mengukur kinerja, memperbaiki proses, dan menciptakan nilai tambah.

6. Strategi Kedua: Transformasi Struktural dan Pekerjaan Bermutu

Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus menghasilkan pekerjaan bermutu. Pekerjaan bermutu adalah pekerjaan yang produktif, formal, memberi penghasilan layak, memiliki perlindungan sosial, membuka kesempatan belajar, dan memungkinkan mobilitas kelas sosial.

Masalah Indonesia bukan hanya pengangguran terbuka, tetapi kualitas pekerjaan. Banyak orang bekerja, tetapi dalam sektor informal, berpenghasilan rendah, tanpa perlindungan sosial, dan tanpa prospek peningkatan keterampilan. Bila pekerjaan semacam ini terlalu dominan, pertumbuhan tidak akan menciptakan kelas menengah yang kuat.

Transformasi struktural harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan produktif di sektor-sektor bernilai tambah. Indonesia perlu mempercepat pengembangan agroindustri, manufaktur menengah-tinggi, jasa modern, ekonomi digital produktif, ekonomi maritim, pariwisata berkualitas, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, dan ekonomi hijau.

Pekerjaan bermutu juga membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang seimbang. Perlindungan pekerja penting, tetapi pasar kerja juga harus cukup fleksibel untuk menyerap tenaga kerja baru dan mendorong formalitas. Sistem pelatihan harus lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Informasi pasar kerja harus diperbaiki agar pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja lebih terhubung.

Pendidikan vokasi harus direformasi menjadi sistem pembentukan keterampilan modern. SMK, politeknik, balai latihan kerja, industri, dan pemerintah daerah harus bekerja dalam satu ekosistem. Kurikulum harus berbasis kompetensi, bukan sekadar mata pelajaran. Sertifikasi harus kredibel. Magang harus bermutu. Industri harus terlibat sejak perancangan kurikulum.

Transformasi struktural juga harus memperhatikan wilayah. Jawa tidak boleh menjadi satu-satunya pusat ekonomi modern. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi lokal. Bila tidak, ketimpangan wilayah akan terus menjadi sumber inefisiensi dan ketidakadilan.

7. Strategi Ketiga: Industrialisasi Baru Berbasis Nilai Tambah

Indonesia membutuhkan industrialisasi baru. Industrialisasi baru bukan sekadar membangun pabrik, melainkan membangun kemampuan produktif yang kompleks: desain, rekayasa, teknologi, riset, logistik, merek, standardisasi, dan integrasi pasar.

Hilirisasi sumber daya alam adalah langkah penting, tetapi hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan awal. Dalam nikel, misalnya, nilai tambah tertinggi bukan hanya berada pada smelter, tetapi juga pada baterai, sistem manajemen baterai, kendaraan listrik, daur ulang baterai, software kendaraan, dan ekosistem energi. Dalam sawit, nilai tambah tidak hanya pada CPO, tetapi juga oleokimia, biomaterial, pangan fungsional, kosmetik, energi terbarukan, dan produk berbasis riset. Dalam perikanan, nilai tambah bukan hanya ikan beku, tetapi cold chain, pengolahan pangan, nutraceutical, bioteknologi laut, dan traceability.

Industrialisasi baru harus berbasis kompleksitas ekonomi. Negara maju menghasilkan produk yang sulit ditiru karena membutuhkan banyak pengetahuan, keterampilan, standar, dan jaringan pemasok. Indonesia perlu bergerak dari produk sederhana ke produk lebih kompleks.

Untuk itu, strategi industri harus memadukan beberapa elemen. Pertama, pemilihan sektor prioritas berbasis potensi dan peluang global. Kedua, penguatan rantai pasok lokal. Ketiga, integrasi industri besar dengan UMKM pemasok. Keempat, investasi dalam riset dan standardisasi. Kelima, akses energi kompetitif dan semakin rendah karbon. Keenam, reformasi logistik dan pelabuhan. Ketujuh, diplomasi perdagangan untuk membuka pasar.

Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan industrialisasi yang hanya bergantung pada perlindungan tanpa peningkatan produktivitas.

Proteksi dapat diperlukan sementara, tetapi harus disertai target kinerja, transfer teknologi, ekspor, peningkatan kualitas, dan batas waktu yang jelas. Industri yang dilindungi tanpa dorongan kompetisi akan menjadi beban ekonomi.

8. Strategi Keempat: Ekonomi Digital sebagai Mesin Produktivitas

Ekonomi digital Indonesia tumbuh cepat, tetapi strategi baru harus memastikan digitalisasi menjadi mesin produktivitas, bukan hanya mesin konsumsi. E-commerce, pembayaran digital, media online, video commerce, dan layanan transportasi digital memang memperluas transaksi. Namun, pertanyaan pembangunan adalah apakah digitalisasi meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Digitalisasi harus masuk ke sektor riil. Pertanian digital dapat membantu petani mengakses informasi cuaca, harga, pembiayaan, benih, pupuk, dan pasar. Industri digital dapat memperbaiki manajemen persediaan, desain produk, pemeliharaan mesin, dan kualitas produksi. UMKM digital dapat memperluas pasar, tetapi juga harus meningkatkan kualitas, branding, pencatatan keuangan, dan manajemen pelanggan. Pemerintah digital dapat menurunkan biaya transaksi dan memperbaiki layanan publik.

AI harus diposisikan sebagai katalis produktivitas nasional. Di sektor kesehatan, AI dapat membantu triase, diagnosis awal, manajemen rumah sakit, dan pemantauan penyakit. Di pendidikan, AI dapat mendukung pembelajaran personal, analisis capaian siswa, dan pengembangan bahan ajar. Di pertanian, AI dapat membantu deteksi hama, prediksi panen, dan manajemen lahan. Di manufaktur, AI dapat digunakan untuk quality control dan predictive maintenance. Di pemerintahan, AI dapat membantu analisis kebijakan, pelayanan warga, dan deteksi penyimpangan.

Tetapi digitalisasi memerlukan prasyarat. Infrastruktur internet harus merata. Literasi digital harus diperluas. Keamanan siber harus diperkuat. Data harus dikelola dengan tata kelola etis. Regulasi platform harus menjaga kompetisi. Talenta digital harus dibangun. Tanpa prasyarat ini,

digitalisasi dapat memperlebar ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil, kota dan desa, serta pekerja terampil dan tidak terampil.

Strategi digital juga harus memperhatikan kedaulatan data. Indonesia perlu memiliki kapasitas nasional dalam cloud, keamanan siber, data governance, AI lokal, dan pengembangan talenta. Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri, melainkan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen teknologi, data, dan nilai tambah.

9. Strategi Kelima: Inovasi Nasional dan Riset Terapan

Inovasi adalah kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai. Indonesia tidak dapat menjadi negara maju bila sistem inovasinya lemah. Pasar besar saja tidak cukup. Sumber daya alam saja tidak cukup. Tenaga kerja murah bukan keunggulan masa depan. Keunggulan masa depan ditentukan oleh pengetahuan, teknologi, desain, merek, sistem, dan kemampuan belajar.

Indonesia perlu memperkuat sistem inovasi nasional melalui hubungan erat antara universitas, industri, pemerintah, komunitas, dan pembiayaan. Riset perguruan tinggi harus lebih banyak terhubung dengan masalah nyata: produktivitas pangan, kesehatan, energi, logistik, perubahan iklim, kemiskinan, industri, dan pendidikan. Industri harus lebih aktif berinvestasi dalam R&D. Pemerintah harus menciptakan insentif riset, pengadaan inovatif, dan regulasi yang mendorong eksperimen.

Pendekatan *mission-oriented innovation* relevan bagi Indonesia. Negara dapat menetapkan misi strategis seperti ketahanan pangan tropis, transisi energi kepulauan, kota rendah karbon, industri alat kesehatan, ekonomi maritim, AI untuk layanan publik, dan digitalisasi UMKM. Misi tersebut kemudian dijalankan melalui riset, pembiayaan, regulasi, pengadaan, dan kemitraan publik-swasta.

Inovasi juga harus inklusif. Teknologi tidak boleh hanya dinikmati korporasi besar. Petani, nelayan, UMKM, koperasi, sekolah, puskesmas, desa, dan pemerintah daerah harus menjadi bagian dari ekosistem inovasi. Teknologi tepat guna, inovasi sosial, model bisnis baru, dan pembelajaran komunitas sama pentingnya dengan paten berteknologi tinggi.

Perguruan tinggi memiliki peran sangat penting. Kampus harus menjadi pusat human capital, pusat riset, pusat inkubasi bisnis, dan pusat kritik kebijakan. Program studi manajemen, ekonomi, teknik, pertanian, kehutanan, kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial harus bekerja lintas disiplin. Tantangan ekonomi masa depan bersifat kompleks, sehingga solusinya tidak dapat berasal dari satu disiplin saja.

10. Strategi Keenam: UMKM Naik Kelas dan Ekonomi Rakyat Produktif

UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, banyak UMKM masih berada pada produktivitas rendah, skala kecil, akses modal terbatas, teknologi sederhana, pencatatan keuangan lemah, dan pasar yang sempit. Strategi baru ekonomi Indonesia harus menjadikan UMKM sebagai agenda produktivitas nasional.

UMKM naik kelas berarti usaha mikro berkembang menjadi kecil, usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menengah mampu masuk rantai pasok industri besar atau ekspor. Untuk itu, kebijakan UMKM tidak boleh hanya berupa bantuan modal atau pelatihan singkat. UMKM memerlukan ekosistem lengkap.

Ekosistem itu meliputi akses pembiayaan produktif, pendampingan manajemen, standardisasi produk, sertifikasi halal dan mutu, desain kemasan, teknologi produksi, digital marketing, logistik, perlindungan hukum, dan koneksi pasar. UMKM juga perlu akses ke pengadaan

pemerintah dan BUMN secara transparan, berbasis kualitas, dan tidak diskriminatif.

Koperasi modern dapat menjadi alat penting. Banyak usaha mikro terlalu kecil untuk membeli bahan baku murah, mengakses mesin, memperoleh pembiayaan, atau memenuhi pesanan besar. Koperasi modern dapat menggabungkan skala ekonomi dengan kepemilikan bersama. Namun, koperasi harus dikelola profesional, transparan, dan berbasis teknologi.

Digitalisasi UMKM harus naik dari sekadar “jualan online” menjadi “manajemen digital”. UMKM perlu belajar pencatatan transaksi, analisis pelanggan, manajemen stok, foto produk, pelayanan pelanggan, pembayaran digital, dan perencanaan arus kas. Tanpa itu, UMKM hanya berpindah dari pasar fisik ke pasar digital tanpa peningkatan produktivitas.

Pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi bisnis, bank, marketplace, dan komunitas dapat membangun pusat pendampingan UMKM berbasis wilayah. Setiap daerah memiliki produk khas: pangan, kerajinan, kopi, kakao, perikanan, pariwisata, tekstil, kayu, bambu, rempah, dan ekonomi kreatif. Produk lokal harus naik kelas melalui desain, kualitas, cerita merek, dan akses pasar.

11. Strategi Ketujuh: Ketahanan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam

Perubahan global memperlihatkan bahwa pangan, energi, dan sumber daya alam adalah isu strategis. Konflik geopolitik dapat mengganggu pasokan energi. Perubahan iklim dapat mengganggu produksi pangan. Proteksionisme dapat menghambat perdagangan komoditas. Karena itu, Indonesia harus membangun ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari strategi ekonomi.

Ketahanan pangan tidak berarti semua pangan harus diproduksi sendiri dengan biaya berapa pun. Ketahanan pangan berarti ketersediaan, keterjangkauan, kualitas gizi, stabilitas pasokan, dan keberlanjutan produksi. Indonesia perlu meningkatkan produktivitas petani, memperbaiki irigasi, mengurangi kehilangan pascapanen, memperkuat cadangan pangan, mengembangkan pangan lokal, memperbaiki logistik, dan memperkuat riset pertanian tropis.

Ketahanan energi harus bergerak dari ketergantungan fosil menuju diversifikasi. IEA mencatat Indonesia adalah produsen batu bara terbesar keempat di dunia, pemasok gas terbesar di Asia Tenggara, produsen biofuel terbesar, dan sedang meningkatkan upaya memanfaatkan potensi energi terbarukan. ([IEA](#)) Posisi ini memberi Indonesia kekuatan, tetapi juga tantangan. Ketergantungan pada batu bara memberi penerimaan dan energi murah dalam jangka pendek, tetapi dapat menjadi risiko jangka panjang ketika pasar global bergerak ke standar rendah karbon.

Transisi energi harus dirancang adil. Daerah penghasil batu bara membutuhkan strategi diversifikasi ekonomi. Pekerja sektor fosil membutuhkan pelatihan ulang. Industri membutuhkan pasokan energi yang andal dan kompetitif. Rumah tangga membutuhkan akses energi terjangkau. Karena itu, transisi energi tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan sosial-ekonomi.

Sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip nilai tambah dan keberlanjutan. Indonesia tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Tetapi Indonesia juga tidak boleh mengorbankan lingkungan demi hilirisasi. Setiap proyek hilirisasi harus memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Masa depan ekonomi Indonesia harus menghindari pola "tumbuh dengan merusak".

12. Strategi Kedelapan: Transisi Hijau dan Ekonomi Sirkular

Transisi hijau bukan sekadar agenda moral, melainkan strategi daya saing. Produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan akan menghadapi hambatan pasar. Investor global semakin memperhatikan risiko iklim. Konsumen semakin peduli pada jejak lingkungan. Lembaga keuangan mulai mengarahkan portofolio ke proyek hijau.

Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi hijau: energi surya, panas bumi, hidro, bioenergi, mangrove, hutan tropis, pertanian berkelanjutan, kendaraan listrik, baterai, ekonomi sirkular, dan pariwisata alam. Namun, peluang ini harus dikelola dengan tata kelola yang kuat.

Ekonomi sirkular dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Limbah plastik dapat diolah. Sampah organik dapat menjadi kompos atau energi. Industri dapat mendesain ulang produk agar dapat digunakan kembali. Kota dapat mengembangkan sistem transportasi publik dan bangunan hemat energi. Pertanian dapat memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik. Ekonomi sirkular mengurangi biaya lingkungan sekaligus menciptakan usaha baru.

Indonesia juga perlu memperkuat pembiayaan hijau. Green bonds, blended finance, carbon market, dan pembiayaan transisi dapat digunakan, tetapi harus kredibel. Pasar karbon tanpa integritas hanya akan menjadi alat kosmetik. Indonesia harus memastikan bahwa klaim hijau didukung pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Transisi hijau juga harus masuk ke kurikulum pendidikan, pelatihan kerja, dan strategi industri. Tenaga kerja masa depan membutuhkan keterampilan hijau: audit energi, instalasi panel surya, manajemen limbah, pertanian regeneratif, teknik lingkungan, ESG reporting, dan desain produk sirkular.

13. Strategi Kesembilan: Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ekonomi

Strategi ekonomi yang baik tidak akan berhasil tanpa kelembagaan yang kuat. Kelembagaan menentukan kualitas implementasi. Indonesia sering memiliki rencana besar, tetapi pelaksanaan terhambat koordinasi, birokrasi, ketidakpastian regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya evaluasi.

Reformasi kelembagaan harus berfokus pada lima hal.

Pertama, kepastian hukum. Investor, UMKM, petani, dan pekerja membutuhkan aturan yang jelas. Ketidakpastian hukum meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan keberanian investasi jangka panjang.

Kedua, regulasi pro-produktivitas. Regulasi harus melindungi kepentingan publik, tetapi tidak boleh membunuh inovasi. Regulasi yang terlalu rumit mendorong informalitas dan rente.

Ketiga, kompetisi sehat. Pasar yang terlalu terkonsentrasi dapat melemahkan inovasi dan menaikkan harga. Negara harus mencegah monopoli, kartel, dan praktik predatoris.

Keempat, koordinasi pusat-daerah. Banyak agenda ekonomi berada di daerah: perizinan, lahan, infrastruktur lokal, pendidikan vokasi, UMKM, pariwisata, pertanian, dan layanan publik. Tanpa koordinasi pusat-daerah, strategi nasional sulit berjalan.

Kelima, evaluasi berbasis data. Program ekonomi harus diukur dampaknya. Bantuan, subsidi, pelatihan, insentif pajak, dan proyek infrastruktur harus dievaluasi berdasarkan hasil, bukan hanya penyerapan anggaran.

Birokrasi masa depan harus menjadi *learning bureaucracy*: mampu belajar dari data, menerima umpan balik, memperbaiki kebijakan, dan bekerja lintas sektor. Reformasi birokrasi harus dihubungkan langsung dengan produktivitas ekonomi.

14. Strategi Kesepuluh: Diplomasi Ekonomi dan Posisi Indonesia dalam Rantai Nilai Global

Di tengah fragmentasi global, diplomasi ekonomi menjadi semakin penting. Indonesia harus aktif memperluas pasar, menarik investasi berkualitas, menjaga akses komoditas strategis, dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam forum global.

Indonesia perlu memainkan strategi diversifikasi. Jangan terlalu bergantung pada satu pasar ekspor, satu sumber investasi, atau satu teknologi. Diversifikasi mitra dagang dan investasi akan memperkuat ketahanan ekonomi.

Indonesia juga perlu memperkuat perjanjian perdagangan yang memberi manfaat nyata. Perjanjian perdagangan bukan hanya soal tarif, tetapi juga standar teknis, jasa, investasi, e-commerce, intellectual property, tenaga kerja, dan keberlanjutan. Pemerintah perlu membantu pelaku usaha, terutama UMKM, agar mampu memanfaatkan perjanjian perdagangan.

Diplomasi ekonomi juga harus mendukung industrialisasi. Perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berperan sebagai intelijen pasar, fasilitator investasi, penghubung teknologi, dan promotor produk Indonesia. Produk Indonesia harus naik kelas dari komoditas menjadi merek, desain, dan kualitas.

Dalam ASEAN, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi digital, manufaktur, energi, pangan, dan maritim. ASEAN bukan hanya pasar, tetapi juga platform untuk memperkuat daya tawar di tengah rivalitas kekuatan besar.

15. Strategi Kesebelas: Pembangunan Wilayah dan Konektivitas Produktif

Peningkatan ekonomi Indonesia harus memperhatikan struktur kepulauan. Indonesia bukan negara kontinental biasa. Biaya logistik, ketimpangan infrastruktur, perbedaan kapasitas daerah, dan jarak pasar menjadi faktor penting.

Pembangunan wilayah harus berbasis potensi lokal. Sumatera dapat menjadi pusat agroindustri, energi, logistik, dan konektivitas Selat Malaka. Jawa dapat menjadi pusat manufaktur, jasa modern, pendidikan tinggi, riset, dan industri kreatif. Kalimantan dapat mengembangkan energi, mineral, ekonomi hijau, dan pusat pemerintahan baru. Sulawesi dapat menjadi pusat nikel, kakao, perikanan, dan maritim. Bali-Nusa Tenggara dapat memperkuat pariwisata berkualitas, peternakan, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Maluku-Papua memiliki potensi perikanan, kehutanan, mineral, biodiversitas, dan ekonomi maritim.

Namun, potensi wilayah tidak otomatis menjadi pertumbuhan. Daerah membutuhkan infrastruktur, SDM, tata kelola, konektivitas digital, akses pembiayaan, dan kepastian lahan. Pemerintah pusat harus membantu daerah membangun kapasitas perencanaan ekonomi berbasis data.

Konektivitas produktif berbeda dari konektivitas fisik biasa. Jalan, pelabuhan, bandara, dan internet harus dikaitkan dengan pusat produksi, pasar, sekolah vokasi, kawasan industri, sentra UMKM, dan pusat logistik. Infrastruktur yang tidak terhubung dengan kegiatan produktif hanya menjadi biaya.

16. Strategi Keduabelas: Perlindungan Sosial Adaptif dan Kesejahteraan Berkelanjutan

Strategi ekonomi baru harus memastikan bahwa transformasi tidak meninggalkan kelompok rentan. Perubahan teknologi, transisi energi, dan restrukturisasi industri dapat menciptakan pemenang dan pihak yang terdampak. Karena itu, perlindungan sosial harus bersifat adaptif.

Perlindungan sosial adaptif berarti bantuan tidak hanya diberikan saat krisis, tetapi juga membantu masyarakat naik kelas. Bantuan sosial harus terhubung dengan pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, akses pembiayaan, dan kesempatan usaha. Data penerima harus diperbaiki agar tepat sasaran. Teknologi dapat membantu, tetapi harus memperhatikan privasi dan keadilan.

Kesejahteraan berkelanjutan juga membutuhkan kebijakan kelas menengah. Kelas menengah adalah fondasi konsumsi, pajak, stabilitas sosial, dan demokrasi. Namun, kelas menengah rentan turun kelas bila biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi terlalu tinggi. Negara perlu membangun layanan publik yang bermutu agar kesejahteraan tidak hanya bergantung pada pendapatan pribadi.

Kesejahteraan juga harus diukur lebih luas dari PDB. Indikator kesehatan, pendidikan, kualitas pekerjaan, lingkungan, keamanan, partisipasi, dan ketimpangan harus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan. PDB penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas hidup.

17. Skenario Ekonomi Indonesia ke Depan

Masa depan Indonesia dapat dibayangkan dalam tiga skenario.

17.1 Skenario Business as Usual

Dalam skenario ini, Indonesia tetap tumbuh sekitar 5%, konsumsi domestik tetap menjadi motor utama, hilirisasi berjalan tetapi terbatas pada pengolahan awal, digitalisasi tumbuh tetapi belum memperkuat produktivitas sektor riil, dan reformasi kelembagaan berjalan lambat. Indonesia tetap stabil, tetapi sulit mencapai pendapatan tinggi pada 2045.

17.2 Skenario Pertumbuhan Eksklusif

Dalam skenario ini, beberapa sektor tumbuh cepat: digital, keuangan, hilirisasi mineral, properti, dan jasa tertentu. Namun, manfaatnya

terkonsentrasi pada kelompok dan wilayah tertentu. Ketimpangan melebar, pekerjaan informal tetap besar, dan daerah tertinggal tidak banyak berubah. Pertumbuhan terjadi, tetapi kohesi sosial melemah.

17.3 Skenario Transformasi Produktif-Inklusif

Dalam skenario terbaik, Indonesia memperkuat produktivitas, inovasi, human capital, industrialisasi bernilai tambah, transisi hijau, UMKM naik kelas, dan tata kelola. Pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga menciptakan pekerjaan bermutu, memperluas kelas menengah, menurunkan kemiskinan, memperkuat daerah, dan menjaga lingkungan. Inilah skenario yang paling sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Skenario ketiga tidak akan terjadi otomatis. Ia membutuhkan kepemimpinan strategis, konsistensi kebijakan, reformasi kelembagaan, investasi manusia, dan kolaborasi nasional.

18. Agenda Implementasi

Agar strategi baru tidak berhenti sebagai wacana, diperlukan agenda implementasi yang konkret.

Pertama, menetapkan produktivitas sebagai indikator utama pembangunan. Setiap program ekonomi harus ditanya: apakah menaikkan produktivitas?

Kedua, menyelaraskan pendidikan dengan transformasi ekonomi. Pendidikan dasar, vokasi, dan tinggi harus dihubungkan dengan kebutuhan masa depan: AI, data, energi hijau, manufaktur modern, kesehatan, pangan, maritim, dan kewirausahaan.

Ketiga, memperkuat reformasi regulasi dan kompetisi. Hambatan masuk pasar harus dikurangi, tetapi perlindungan konsumen, tenaga kerja, dan lingkungan harus diperkuat.

Keempat, memperluas investasi berkualitas. Investasi harus membawa teknologi, keterampilan, rantai pasok lokal, ekspor, dan standar keberlanjutan.

Kelima, membangun pusat inovasi wilayah. Setiap wilayah perlu memiliki klaster produktif berbasis potensi lokal dan didukung kampus, industri, pemerintah daerah, dan pembiayaan.

Keenam, mempercepat digitalisasi sektor riil. Pertanian, manufaktur, logistik, kesehatan, pendidikan, UMKM, dan pemerintahan harus menjadi sasaran utama digitalisasi produktif.

Ketujuh, menjalankan transisi energi yang adil. Energi terbarukan harus diperluas, tetapi pekerja dan daerah yang terdampak harus diberi jalan transformasi.

Kedelapan, memperkuat diplomasi ekonomi. Perdagangan, investasi, teknologi, dan standar keberlanjutan harus menjadi agenda diplomasi utama.

Kesembilan, memperbaiki data dan evaluasi kebijakan. Tanpa data yang baik, strategi ekonomi hanya menjadi klaim.

Kesepuluh, membangun konsensus nasional. Transformasi ekonomi memerlukan waktu panjang, melampaui siklus politik jangka pendek.

19. Penutup

Strategi baru peningkatan ekonomi Indonesia harus lahir dari kesadaran bahwa dunia telah berubah. Era globalisasi sederhana, ketika negara cukup membuka pasar, menarik investasi, mengeksport komoditas, dan mengandalkan tenaga kerja murah, tidak lagi memadai. Dunia kini lebih fragmentaris, digital, hijau, kompetitif, dan penuh ketidakpastian.

Indonesia memiliki modal besar: penduduk, pasar, sumber daya alam, lokasi strategis, ekonomi digital, dan pengalaman menjaga stabilitas.

Namun, modal besar tidak otomatis menjadi kemakmuran. Ia harus diubah melalui produktivitas, inovasi, human capital, industrialisasi, tata kelola, dan keberlanjutan.

Strategi baru ekonomi Indonesia harus menggeser orientasi dari pertumbuhan kuantitatif menuju transformasi kualitatif. Dari konsumsi menuju produktivitas. Dari komoditas menuju nilai tambah. Dari digitalisasi konsumtif menuju digitalisasi produktif. Dari pekerjaan informal menuju pekerjaan bermutu. Dari eksploitasi sumber daya menuju ekonomi hijau. Dari pembangunan terpusat menuju pertumbuhan wilayah. Dari kebijakan sektoral menuju strategi nasional terpadu.

Tujuan akhirnya bukan sekadar ekonomi yang lebih besar, tetapi Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, lebih produktif, lebih inovatif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan. Itulah makna strategis peningkatan ekonomi Indonesia di tengah perubahan global.

Glossarium

AI (Artificial Intelligence): Kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan sistem komputer mengenali pola, membuat prediksi, menghasilkan rekomendasi, dan membantu pengambilan keputusan.

Bonus demografi: Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daya saing: Kemampuan negara, daerah, atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa secara efisien, bermutu, dan mampu bersaing di pasar.

Digitalisasi produktif: Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan nilai tambah, bukan hanya memperluas transaksi konsumsi.

Ekonomi hijau: Sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengurangi risiko lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya.

Ekonomi sirkular: Model ekonomi yang mengurangi limbah melalui penggunaan kembali, perbaikan, daur ulang, dan desain produk yang berkelanjutan.

Fragmentasi global: Pemecahan hubungan ekonomi global akibat konflik geopolitik, proteksionisme, perang dagang, atau perbedaan blok teknologi.

GMV (Gross Merchandise Value): Nilai total transaksi barang atau jasa pada platform digital sebelum dikurangi biaya, diskon, atau pengembalian.

Hilirisasi: Proses meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan menjadi produk setengah jadi atau produk akhir.

Human capital: Modal manusia berupa pendidikan, keterampilan, kesehatan, karakter, dan pengalaman yang meningkatkan produktivitas.

Industrialisasi baru: Pengembangan industri berbasis nilai tambah, teknologi, riset, desain, logistik, dan integrasi rantai nilai modern.

Inovasi: Proses menciptakan atau menerapkan ide, teknologi, model bisnis, atau cara kerja baru yang menghasilkan nilai.

Kesejahteraan berkelanjutan: Kesejahteraan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis serta dapat dipertahankan lintas generasi.

Kompleksitas ekonomi: Tingkat kecanggihan struktur produksi suatu negara berdasarkan kemampuan menghasilkan produk yang beragam dan sulit ditiru.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem perlindungan sosial yang mampu merespons krisis sekaligus membantu masyarakat meningkatkan kapasitas ekonomi.

Produktivitas: Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih baik dengan input yang sama atau lebih sedikit.

Rantai nilai global: Jaringan produksi internasional yang membagi proses produksi barang atau jasa ke berbagai negara.

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar pekerja dapat beralih ke pekerjaan atau sektor baru.

Transformasi struktural: Perubahan struktur ekonomi dari sektor bernilai tambah rendah menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Transisi energi: Perubahan sistem energi dari dominasi bahan bakar fosil menuju energi yang lebih bersih, terbarukan, dan rendah karbon.

UMKM naik kelas: Proses peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih produktif, formal, kompetitif, dan mampu masuk pasar lebih luas.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Dalam P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier.

DOI: 10.1016/S1574-0684(05)01006-3

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351. DOI: 10.2307/2951599

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (Y-on-Y)*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *In September 2025, the percentage of the poor population decreased to 8.25 percent*. BPS-Statistics Indonesia.

Bloom, N., & Van Reenen, J. (2007). Measuring and explaining management practices across firms and countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351–1408. DOI: 10.1162/qjec.2007.122.4.1351

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. DOI: 10.1007/s10887-006-9009-4

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575. DOI: 10.1073/pnas.0900943106

International Energy Agency. (2025). *Indonesia: Countries and regions*. IEA.

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation*. IMF.

International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, April 2026: Global Economy in Flux*. IMF.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90168-7

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. DOI: 10.1093/icc/dty034

Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. *The American Economic Review*, 56(1/2), 69–75.

OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/de87555a-en

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. DOI: 10.1007/s10887-015-9122-3

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. DOI: 10.1086/261725

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. DOI: 10.2307/1884513

UNCTAD. (2026). *World Investment Report 2026: International investment in a turbulent era*. United Nations Trade and Development.

WIPO. (2025). *Global Innovation Index 2025: Indonesia profile*. World Intellectual Property Organization.

World Bank. (2026). *Global Economic Prospects, June 2026*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia Growth and Jobs Report: Running faster, for longer—Structural transformation, productivity, and good jobs*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 8 July 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a4e3fcf-7d48-83ec-a0ac-d7721f26b819)). <https://chatgpt.com/c/6a4e3fcf-7d48-83ec-a0ac-d7721f26b819>